

**KEBIJAKAN POLITIK DAULAH RUSTAMIYYAH
DI KAWASAN MAGRIB (160-296 H. / 776-909 M.)**



Oleh:
Ahmad Choirul Rofiq
NIM: 09.34.703/S3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DISERTASI
Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.
NIM : 09.34.703/S3
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Januari 2014
Saya yang menyatakan,



Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.
NIM: 09.34.703/S3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557979
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. http://pps.uin-suka.ac.id.

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **KEBIJAKAN POLITIK DAULAH RUSTAMIYYAH DI KAWASAN MAGRIB (160-296 H/776-909 M)**

Ditulis oleh : Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.
NIM : 09.34.307/S3

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 5 Juli 2014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. http://pps.uin-suka.ac.id.

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA / PROMOSI

Disertasi berjudul : **KEBIJAKAN POLITIK DAULAH RUSTAMIYAH DI KAWASAN MAGRIB (160-296 H/776-909 M)**

Ditulis oleh : Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.

NIM : 09.34.307/S3

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. (Penguji) ()

Sekretaris Sidang : Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A. (Penguji) ()

Anggota

1. Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, MA.
(Promotor / Penguji) ()
2. Drs. Zamzam Affandi, M.Ag., Ph.D.
(Promotor / Penguji) ()
3. Nurul Haq, M.Hum., Ph.D.
(Penguji) ()
4. Prof. Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
(Penguji) ()
5. Prof. Dr. H. Dudung Abdurrahman, M.Hum.
(Penguji) ()
6. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.
(Penguji) ()

Diujji di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2014

Pukul 10.00 s.d selesai

Hasil / Nilai

Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Puji *)

*) Coret yang tidak sesuai



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. http://pps.uin-suka.ac.id.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 2013), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, AHMAD CHOIRUL ROFIQ, M.Fil.I. NIM : 09.34.307/S3 LAHIR DI NGAWI TANGGAL 8 MARET 1977,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**~~

KEPADА SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM STUDI KEISLAMAN, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-409

YOGYAKARTA, 5 JULI 2014

A.N. REKTOR,
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. H. AIZAR ALI, M.Ag.
NIP. 19640321 199203 1 003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

KEBIJAKAN POLITIK DAULAH RUSTAMIYYAH DI KAWASAN MAGRIB (160–296 H. / 776-909 M.)

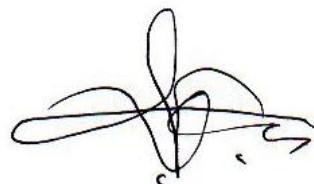
yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.
NIM : 09.34.703/S3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 28 Januari 2014
Promotor/Penilai
YOGYAKARTA



Prof. Dr. H. M. Abdul Karim, M. A., M. A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

KEBIJAKAN POLITIK DAULAH RUSTAMIYYAH DI KAWASAN MAGRIB (160–296 H. / 776-909 M.)

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.
NIM : 09.34.703/S3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 28 Januari 2014

Promotor/Penilai

Zamzani Affandi, M. Ag., Ph. D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

KEBIJAKAN POLITIK DAULAH RUSTAMIYYAH DI KAWASAN MAGRIB (160–296 H. / 776-909 M.)

yang ditulis oleh:

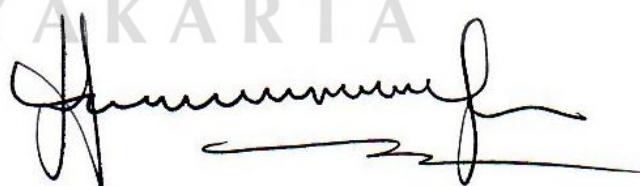
Nama : Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.
NIM : 09.34.703/S3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2014

Penilai



Dr. Nurul Hak, M. Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

KEBIJAKAN POLITIK DAULAH RUSTAMIYYAH DI KAWASAN MAGRIB (160–296 H. / 776-909 M.)

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.
NIM : 09.34.703/S3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2014

Penilai

Prof. Dr. H. Mundzirin Yusuf, M. Si.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

KEBIJAKAN POLITIK DAULAH RUSTAMIYYAH DI KAWASAN MAGRIB (160–296 H. / 776-909 M.)

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I.
NIM : 09.34.703/S3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2014

Penilai



Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M. Hum.

Abstrak

Daulah Rustamiyyah (160-296 H. / 776-909 M.) yang bermazhab Ibādiyyah berhasil mewujudkan kemajuan signifikan di kawasan Magrib. Sebagian besar literatur kurang menaruh perhatian secara mendalam terhadap perkembangan peradabannya. Kenyataan ini bertolak belakang dengan kajian daulah lainnya dari Sunni maupun Syi'ah. Disertasi ini bertujuan untuk menerangkan proses terbentuknya kekuasaan politik Rustamiyyah sampai keruntuhannya di kawasan Magrib, hubungan historis ideologis Rustamiyyah dengan Khawarij Ibādiyyah, realisasi kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintahan Rustamiyyah, dan faktor yang mendorong pelaksanaan kebijakan daulah itu. Metode sejarah yang dipergunakan meliputi pemilihan topik, pengumpulan data, verifikasi, interpretasi, dan penulisan laporan penelitian. Pendekatan behavioral dilakukan untuk menganalisis perilaku politik pemerintah Rustamiyyah dan mengungkap faktor di balik penerapan kebijakannya, sedangkan pendekatan keagamaan dipergunakan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan politik Rustamiyyah dengan doktrin Ibādiyyah.

Sebelum ‘Abd ar-Raḥmān ibn Rustam mendirikan Daulah Rustamiyyah, dakwah Khawarij Ibādiyyah telah tersebar di Magrib. Daulah itu mempunyai hubungan historis dan ideologis dengan Ibādiyyah. Ia mengalami keruntuhan diakibatkan serangan Daulah Fāṭimiyyah. Kebijakan Rustamiyyah yang berhubungan dengan suksesi kepemimpinan bertolak belakang dengan doktrin Ibādiyyah yang menyatakan bahwa setiap muslim dapat dipilih menjadi pemimpin Islam apabila memenuhi syarat tertentu. Suksesi yang terbatas pada keturunan Ibn Rustam dipengaruhi berbagai faktor politis. Kebijakan politik Rustamiyyah yang berkaitan dengan kehidupan beragama, perekonomian, dan penyelesaian konflik cenderung dilandasi oleh motif ideologis Ibādiyyah yang menekankan pada pengutamaan sikap moderat berdasarkan asas kebebasan, toleransi, keadilan, dan upaya optimal untuk menghindari kekerasan.

Dengan pembahasan mengenai pemerintahan Rustamiyyah, hubungannya dengan Ibādiyah, dan penerapan kebijakan politiknya, maka disertasi ini dapat meminimalkan dominasi historiografi non-Khawarij yang selama ini tampak kurang memperhatikan sejarah politik Khawarij dan prestasi yang telah dicapainya.

Kata kunci: Rustamiyyah, Khawarij, Ibādiyyah, kebijakan politik, moderasi

Abstract

The Rustamids (160-296 AH / 776-909 AD) were Ibadite dynasty. They obtained significant achievements in the Maghreb. Most of the works have paid little attention to the development of Islamic civilization during the Rustamid government. This fact is very contrary to the study of Sunnite or Shi'ite dynasties. This work discusses the history of the Rustamid government in the Maghreb from its beginning until its downfall, its historical and ideological connection to the Ibadite sect, its policies related to succession of government, religious life, economic activity, and conflict resolution, as well as the factor underlay the implementation of the policies. This dissertation uses a historical method that is composed of topic selection, data collection, verification, interpretation, and historiography. The behavioral approach is used to analyse the political behavior of Rustamid government and to explain the factor of Rustamid policies. Besides, the religious approach is also applied to know the appropriateness of Rustamid policy to the Ibadite doctrine.

Before 'Abd ar-Rahmān ibn Rustam founded the Rustamid Dynasty the Ibādīte sect had been preached in the Magrib. The Rustamids had historical and ideological connection to the Ibadite sect. The Rustamids collapsed after the attack of the Fatimids. The Rustamid policy related to government succession was incompatible with the Ibadite doctrine, i.e. everyone who had certain criteria could be selected to be a leader of Muslims, without privilege of particular lineage or ethnicity. The succession was limited to the descendants of 'Abd ar-Rahmān ibn Rustam. There were many political factors that caused such succession. The policy related to religious life, economic activity, and conflict resolution had more ideological motives based on the Ibadite teaching that emphasized the moderate behaviour based on the principles of freedom, tolerance, justice, and optimal effort to avoid violence.

After finishing the discussion on the governance of the Rustamids, their relation to the Ibadite sect, and their policy implementation, this dissertation can minimize the dominance of non-Kharijite Islamic historical writing that generally has less attention to political history of the Kharijites and their accomplishments.

Keywords: the Kharjites, the Ibadites, the Rustamids, policy, moderation

الملخص

إن الدولة الرستمية (160-296 هـ / 909-776 م) دولة خارجية إباضية. ولقد حققت الدولة الرستمية إنجازات هامة في المغرب. إن معظم المصنفات لا تبحث بعمق في تطور الحضارة الإسلامية الموجودة في عهد حكومة الدولة الرستمية. هذه الواقعة تناقض دراسة الدول السنوية أو الشيعية بشدة التناقض. إن هذه الدراسة تتناول بداية قيام الدولة الرستمية إلى سقوطها، وعلاقتها التاريخية والاعتقادية بالإباضية، وسياساتها المتعلقة بتغيير الحكومة والحياة الدينية والأنشطة الاقتصادية وحل المنازعات والعوامل الكامنة وراء تطبيق تلك السياسات. هذا البحث يستخدم منهج البحث التاريخي الذي يتكون من اختيار الموضوع وجمع البيانات والتحقيق وتفسير البيانات وكتابة التاريخ. إن استعمال الطريقة السلوكية في هذا البحث لبيان سلوك الحكومة الرستمية ودوافع سياستها، وأما الطريقة الدينية فمستخدمة لمعرفة موافقة السياسة الرستمية بالمذهب الإباضي.

لقد انتشرت الدعوة الإباضية في المغرب قبل قيام الدولة الرستمية. إن للدولة الرستمية علاقة تاريخية واعتقادية بالإباضية. وإن سقوط هذه الدولة بسبب هجوم الدولة الفاطمية. إن السياسة الرستمية المتعلقة بتغيير الحكومة لا تتفق مع النظام الإباضي الذي يقرر أن الحكومة حق لأي مسلم لديه شروط معينة ليكون أمير المسلمين بدون تفضيل على أشرف الأنساب أو القبائل الخاصة. وهناك عدة العوامل السياسية الدافعة إلى تلك الواقعة. والسياسة الرستمية المرتبطة بالحياة الدينية والأنشطة الاقتصادية وحل المنازعات مستندة إلى الدوافع الأيديولوجية وفقاً للنظام الإباضي الذي يؤكد على تفضيل السلوك المعترد القائم على مبادئ الحرية والتسامح والعدالة والمحاولة الجادة لاجتناب عملية العنف.

بعد الانتهاء من تنفيذ البحث العلمي في تاريخ الدولة الرستمية الإباضية، وعلاقتها التاريخية والاعتقادية بالإباضية، ومناقشة قضية سياستها، لقد استطاع هذا البحث تقليل سيادة كتابة التاريخ الإسلامي التي تهتم كثيراً بالتاريخ غير الخارجي وتعطي قلة الاهتمام إلى التاريخ السياسي للخارج وإنجازاتهم.

الكلمات الدليلية: الخوارج، الإباضية، الدولة الرستمية، السياسة، الاعتدال

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zā'	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mim	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wawu	w	We
ه	ḥā'	ḥ	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta‘aqqidin ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitrī
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

— —́ —՝	kasrah fatḥah ḍammah	ditulis ditulis ditulis	i a u
---------------	----------------------------	-------------------------------	-------------

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jahiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas‘ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بِنْكُم	ditulis ditulis	ai bainakum
kasrah + wawu mati فُول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
----------	---------	---------

أَعْدَتْ لِنْ شَكْرُتْم	ditulis ditulis	u‘iddat la‘in syakartum
----------------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن القياس	ditulis ditulis	al-Qur'an al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el)-nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوی الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	żawī al-furūḍ ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya. Penyelesaian disertasi ini terwujud berkat pertolongan Allah dan dukungan tulus berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memfasilitasi studi penulis.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang memotivasi penulis.
3. Kaprodi S-3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengarahkan penulis.
4. Promotor yang membimbing penulis dengan ikhlas dan sabar.
5. Penguji yang memberikan saran dalam penulisan disertasi ini secara tulus.
6. Direktur Jenderal DIKTIS Kementerian Agama RI yang memberikan beasiswa studi kepada penulis.
7. Ketua STAIN Ponorogo yang memberikan izin studi kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan mereka mendapatkan pahala berlimpah dari Allah. Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran konstruktif sangat diharapkan. Penulis berdoa agar tulisan sederhana ini mendapatkan ridha Allah dan bermanfaat pada saat sekarang maupun mendatang.

Yogyakarta, 26 Rabi' al-Awwal 1435 H.
28 Januari 2014 M.

Penulis

DAFTAR ISI

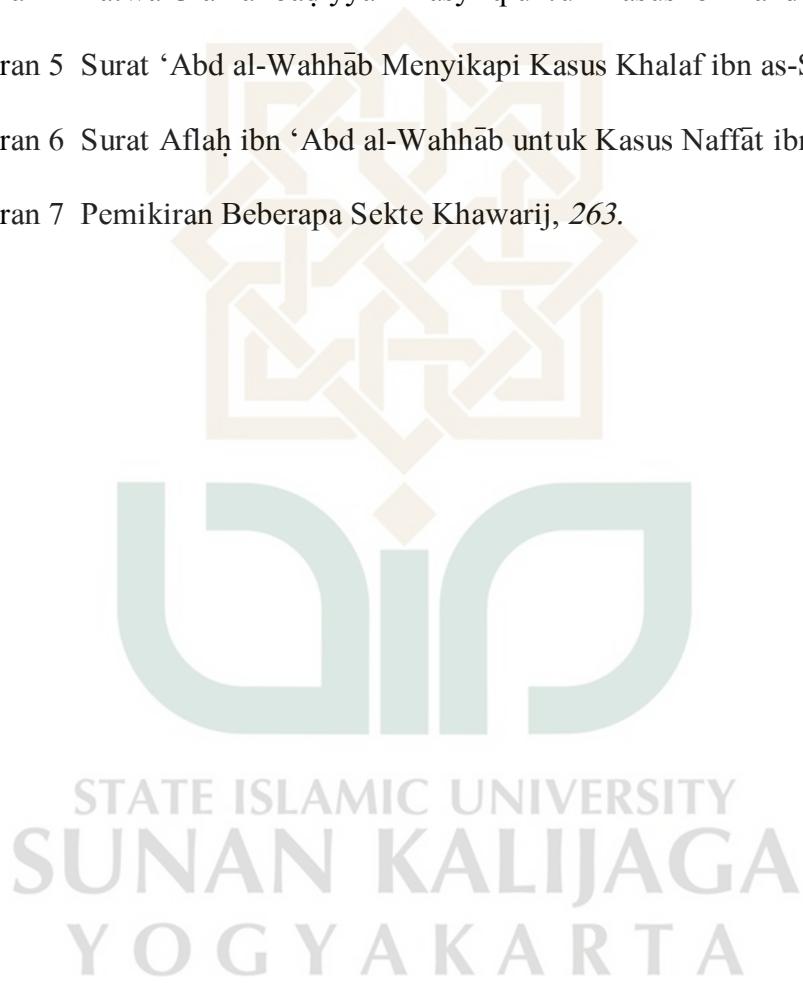
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : PROSES PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN RUSTAMIYYAH DI KAWASAN MAGRIB HINGGA KERUNTUHANNYA.....	28
A. Konteks Politik dan Sosial Periode Islam Klasik	28
B. Kawasan Magrib sebelum Berdirinya Daulah Rustamiyyah	44
C. Sistem Politik dan Struktur Sosial dalam Pemerintahan Rustamiyyah	71
D. Para Pemimpin Daulah Rustamiyyah	78
BAB III: HUBUNGAN HISTORIS IDEOLOGIS DAULAH RUSTAMIYYAH DENGAN KHAWARIJ IBĀDIYYAH	98
A. Latar Belakang Kemunculan Khawarij dan Perkembangannya.....	98
B. Khawarij Ibādiyyah (Para Tokoh dan Wilayah Penyebaran)	127
C. Doktrin Keagamaan dan Politik Khawarij Ibādiyyah	151
BAB IV: KEBIJAKAN POLITIK DAULAH RUSTAMIYYAH DAN LATAR BELAKANG PENERAPANNYA.....	161
A. Suksesi Pemerintahan	161
B. Kehidupan Beragama	184
C. Aktivitas Ekonomi	191
D. Penyelesaian Konflik	202

BAB V: PENUTUP	233
A. Kesimpulan.....	233
B. Saran	236
DAFTAR PUSTAKA	237
LAMPIRAN	246
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Wilayah Kekuasaan Rustamiyyah, 246.
- Lampiran 2 Jalur Perdagangan Masa Rustamiyyah, 248.
- Lampiran 3 Surat ‘Abd Allāh ibn Ibād kepada ‘Abd al-Malik ibn Marwān, 250.
- Lampiran 4 Fatwa Ulama Ibādiyyah Masyriq untuk Kasus Ibn Fandīn, 251.
- Lampiran 5 Surat ‘Abd al-Wahhāb Menyikapi Kasus Khalaf ibn as-Samh, 253.
- Lampiran 6 Surat Aflah ibn ‘Abd al-Wahhāb untuk Kasus Naffāt ibn Naṣr, 254.
- Lampiran 7 Pemikiran Beberapa Sekte Khawarij, 263.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang golongan *Khawārij* (selanjutnya ditulis Khawarij) dan kesan umum yang muncul mengenai golongan tersebut cenderung bersifat negatif. Hal ini karena setiap Khawarij biasanya diidentikkan dengan golongan pembelot ekstremis dan dinilai sebagai teroris fanatik yang melakukan perlawanan dan pemberontakan secara radikal terhadap pemerintahan yang sah.¹ Sejarah menyebutkan bahwa golongan Khawarij terbagi menjadi berbagai kelompok. Di antara kelompok-kelompok Khawarij itu terdapat kelompok yang dipandang sebagai kelompok paling moderat, yakni Ibādiyyah.² Pada umumnya, penamaan Ibādiyyah dinisbatkan kepada ‘Abd Allāh ibn Ibād at-Tamīmī, padahal telah ada tokoh-tokoh lain yang mempunyai peranan signifikan bagi perkembangan mazhab Ibādiyyah sebelum Ibn Ibād, di antaranya ialah Abū Bilāl Mirdās at-Tamīmī dan Jābir ibn Zaid al-‘Umānī.

Mirdās merupakan pemimpin kelompok dari sempalan Khawarij yang berpandangan moderat. Menurutnya, kegiatan penyebaran ideologi mereka

¹Fetima Mernissi, *Islam and Democracy: Fear of the Modern World*, terj. Mary Jo Lakeland (Cambridge: Perseus Publishing, 2002), hlm. 27-28; Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 59-60; Karen Armstrong, *Islam: A Short History* (New York: Modern Library, 2002), hlm. 35; G. E. Von Grunebaum, *Classical Islam: A History 600-1258*, terj. Katherine Watson (London: George Allen and Unwin, 1970), hlm. 60; dan Jeffrey T. Kenney, *Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 23.

²Muhammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mažāhib al-Islāmiyyah fī as-Siyāsah wa al-‘Aqā’id*, Jilid I (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1946), hlm. 89; ‘Āmir an-Najjār, *al-Khawārij: ‘Aqīdah, wa Fikran, wa Falsafah* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1990), hlm. 165; dan Nāyif Maḥmūd Ma‘rūf, *al-Khawārij fī al-‘Aṣr al-Umawī* (Beirut: Dār at-Taṣī‘ah, 1994), hlm. 239.

pasca kekalahan dalam perang Nahrawān di tangan Khalifah ‘Alī ibn Abī Ṭālib hendaknya dilakukan secara rahasia untuk menghindari tekanan-tekanan keras yang dilancarkan pemerintah Daulah³ Umawiyyah. Kelompok yang dibentuk oleh Mirdās ini menyebut diri mereka dengan nama *Ahl ad-Da‘wah*. Ia menyeru kepada para pengikutnya supaya tidak memerangi orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, kecuali apabila orang-orang tersebut secara terang-terangan memaksa mereka untuk mengadakan peperangan.⁴ Jābir adalah tokoh Khawarij Ibādiyyah yang berasal dari Oman. Ia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Mirdās. Peranan Jābir bagi kelangsungan Ibādiyyah semakin menonjol setelah Mirdās meninggal.⁵ Ibn Ibād berasal dari Irak yang mendatangi Jābir untuk menuntut ilmu kepadanya dan berdiskusi mengenai permasalahan keagamaan. Penamaan Ibādiyyah umumnya disandarkan kepada Ibn Ibād karena ia pendiri aliran Ibādiyyah, meskipun ulama Ibādiyyah menyatakan Jābir sebagai pendiri utama Ibādiyyah karena Ibn Ibād dalam mengambil tindakan dan menyampaikan pendapatnya seringkali berpedoman pada pandangan dan pertimbangan Jābir.⁶ Selain ketiga tokoh di atas, terdapat figur lain yang turut berperan dalam penyebaran Ibādiyyah, misalnya Abu ‘Ubaidah Muslim ibn Abī Karīmah at-Tamīmī. Ia adalah orang yang

³Makna daulah bermacam-macam, antara lain pemerintahan, negara, dan dinasti. Istilah ini dipertahankan sebagaimana asalnya dalam bahasa Arab supaya lebih sesuai dengan konteks zamannya. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Beirut: Librarie du Liban, 1980), hlm. 302; Joyce M. Hawkins et al., *Al-Muhit Oxford Study Dictionary* (Beirut: Academia, 2003), hlm. 1041; dan Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 240.

⁴Iwaq Muhammād Khaffāf, *al-Uṣūl at-Tārikhiyyah li al-Firqah al-Ibādiyyah* (Seeb: Wizārat at-Turās al-Qaumī wa as-Šaqāfah, 1994), hlm. 5-6.

⁵*Ibid.*, hlm. 20-24.

⁶*Ibid.*, hlm. 9.

bertanggung jawab dalam urusan pendanaan, kekuatan militer, dan penyebaran ideologi Ibādiyyah ke luar Bashrah. Ia menggantikan posisi Jābir dan paling giat mengirimkan para propagandis Ibādiyyah ke luar wilayah Bashrah.⁷

Berkat perencanaan yang tertata sangat rapi dan penuh kecermatan, maka akhirnya perjuangan gerakan Ibādiyyah dapat berhasil meraih kesuksesan. Hal itu terbukti dengan keberhasilan penyebaran Ibādiyyah ke berbagai wilayah di luar Bashrah sebagai pusat dan titik awal gerakan Ibādiyyah. Wilayah-wilayah yang dapat dicapai gerakan Ibādiyyah antara lain Hadramaut, Yaman, Oman, Zanzibar (Tanzania), Libya, Tunisia, dan Aljazair, bahkan sebagian di antaranya mampu mendirikan pemerintahan Ibādiyyah. Misalnya, pemerintahan di Hadramaut dan Yaman pada masa Daulah Umawiyyah tahun 129 H. (746 M.), pemerintahan di Oman yang berlangsung dua periode, yakni tahun 132-134 H. (750-752 M.) dan 177-280 H. (793-893 M.), serta pemerintahan Rustamiyyah (Rustumiyah) di Magrib pada masa Daulah ‘Abbāsiyyah.⁸

Istilah Magrib pada saat itu meliputi suatu kawasan antara batas akhir Ifrīqiyyah di Milyānah sampai Samudra Atlantik, dan selanjutnya mencakup Andalusia.⁹ Pendapat lainnya menyatakan bahwa Magrib meliputi wilayah di antara Mesir sampai Samudra Atlantik. Ketika pasukan muslim menundukkan

⁷*Ibid.* dan Ahmad Muhammad Ahmad Ja‘fī, *Dirāsah ‘an al-Firaq wa Tārīkh al-Muslimīn: al-Khawārij wa asy-Syi‘ah* (Riyadh: Markaz al-Malik Faiṣal li al-Buhūs wa ad-Dirāsat al-Islāmiyyah, 1988), hlm. 77-78.

⁸Khalīfāt, *al-Uṣūl*, hlm. 51-52; Fārūq ‘Umar Fauzī, *al-Imāmah al-Ibādiyyah fī ‘Umān* (Oman: Jāmi‘ah Ali Bait, 1997), hlm. 5; Muhammad Ḥasan al-Harīrī, *ad-Daulah ar-Rustamiyyah bi al-Magrib al-Islāmī: Haḍāratuhā wa ‘Alāqatuhā al-Khārijiyah bi al-Magrib wa al-Andalus* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1987), hlm. 185; Ibn ‘Izzārī, *al-Bayān al-Mugrib fī Akhbār al-Andalus wa al-Magrib*, Jilid I (Leiden: E.J. Brill, 1948), hlm. 197; dan ‘Afī Yahyā Mu‘ammar, *al-Ibādiyyah fī Maukib at-Tārīkh*, Jilid II (Seeb: Maktabat aḍ-Ḍāmirī, 2008), hlm. 7.

⁹Yāqūt ibn ‘Abd Allāh al-Ḥamawī, *Mu‘jam al-Buldān*, Jilid V (Beirut: Dār Ṣādir, 1977), hlm. 161.

wilayah itu, mereka belum menyebutnya dengan istilah Magrib. Mereka memakai istilah Ifrīqiyyah yang waktu itu sudah populer di kalangan orang-orang Bizantium. Istilah Ifrīqiyyah lambat laun mengalami penyempitan sehingga hanya meliputi Tripolitania dan sebagian Tunisia. Selanjutnya, ahli geografi Arab menyematkan istilah Magrib Aqṣā untuk wilayah yang terjauh di kawasan Magrib, serta memunculkan istilah Magrib Ausaṭ untuk wilayah yang berada di antara keduanya.¹⁰ Magrib terdiri tiga wilayah, yakni Magrib Adnā yang sekarang mencakup Tunisia, Magrib Ausaṭ yang sekarang mencakup Aljazair, dan Magrib Aqṣā yang sekarang mencakup Maroko.¹¹ Informasi lain mengatakan bahwa Magrib sekarang mencakup lima wilayah negara, yakni Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Pada masa kini penyebutan Magrib hanya dipergunakan untuk menunjuk wilayah Maroko, yang kadang disebut dengan al-Magrib al-‘Arabi¹².

Posisi Daulah Rustamiyyah berbatasan langsung dengan Daulah Aglabiyah (183-296 H. / 800-909 M.), Idrīsiyyah (172-313 H. / 789-926 M.), dan Daulah Midrāriyyah (140-296 H. / 757-909 M.), sebagaimana tercantum dalam peta.¹³ Tahert (Tihart, Tāhart, dan Taihort)¹⁴ yang menjadi ibukota

¹⁰ Al-Harīrī, *ad-Daulah*, hlm. 11-13.

¹¹ Muḥammad al-Amīn Muḥammad dan Muḥammad ‘Afī ar-Rahmānī, *al-Mufid fī Tārīkh al-Magrib* (Casablanca: Dār al-Kitāb, t. t.), hlm. 7; Sulaimān Bāsyā al-Barūnī, *al-Azhār ar-Riyādiyyah fī A’immaḥ wa Mułūk al-Ibādiyyah*, Jilid II (Oman: Salṭanah ‘Umān, 1987), hlm. 39; ‘Afī Muḥammad as-Šallābī, *Safahāt Musyriqah min at-Tārīkh al-Islāmī fī asy-Syamāl al-Ifrīqī*, Jilid I (Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2007), hlm. 98; dan ‘Iṣām ad-Dīn ‘Abd ar-Ra’ūf al-Faqqāl, *Tārīkh al-Magrib wa al-Andalus* (Kairo: Maktabat Nahḍah asy-Syarq, 1990), hlm. 12.

¹²<http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb> (diakses 6 Agustus 2012)

¹³ Husain Mu’nis, *Atlas Tārīkh al-Islām* (Kairo: az-Zahrā’ li al-I’lām al-‘Arabi, 1987), hlm. 159 dan al-Harīrī, *ad-Daulah*, hlm. 248. Lihat lampiran 1 tulisan ini.

¹⁴ Maurice Lombard, *The Golden Age of Islam*, terj. Joan Spencer (Princeton: Markus Wiener Publishers, 2004), hlm. 215; Mu‘ammār, *al-Ibādiyyah*, Jilid II, hlm. 7; Ibn ‘Izārī, *al-Bayān*, Jilid I, hlm. 196; dan S. Khuda Bakhsh, *Politics in Islam* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1981),

Daulah Rustamiyyah saat ini berada dekat Tiaret di kawasan Aljazair Barat Laut,¹⁵ sedangkan Jabal Nafūsah (al-Jabal al-Garbi) yang juga menjadi wilayah kekuasaan daulah ini sekarang berada di kawasan Libya Barat Laut.¹⁶ Oleh karena itu, secara geografis wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Magrib Ausaṭ dan Magrib Adnā.¹⁷ Cakupan wilayah inilah yang menjadi batasan disertasi ini.

Daulah Rustamiyyah merupakan daulah berideologi Khawarij yang disebutkan oleh Masudul Hasan sebagai pemerintahan Khawarij pertama di dunia di kawasan Magrib.¹⁸ Menurut Maḥmūd Ismā‘īl, pemerintahan Khawarij pertama bukan Daulah Rustamiyyah. Kelompok Ṣufriyyah adalah yang pertama mendirikan pemerintahan di Sijilmāsaḥ (sekarang masuk wilayah Maroko) pada tahun 140 H. (757 M.) di bawah pimpinan Abū al-Qāsim Samkū yang bergelar Midrār.¹⁹ Jika merujuk peta wilayah kedua daulah tersebut dan membandingkan luas masing-masing, maka wilayah kekuasaan Daulah Rustamiyyah lebih luas daripada Daulah Banū Midrār. Selain itu, sebagian pemimpin pemerintahan Banū Midrār ternyata tidak murni beraliran Ṣufriyyah.

Al-Bārūnī menyebutkan situasi instabilitas pemerintahan Midrāriyyah pada awal perjalannya. Mula-mula orang-orang Ṣufriyyah mengangkat ‘Isā

hlm. 72. Terdapat beberapa penulisan nama kota ini yang berbeda. Di sini penulis menggunakan nama Tahert.

¹⁵Clifford Edmund Bosworth, *The Islamic Dynasties* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980), hlm. 22.

¹⁶<http://en.wikipedia.org/wiki/Tiaret> dan http://en.wikipedia.org/wiki/Jabal_Nafusa (diakses 6 Agustus 2012).

¹⁷Al-Ḥarīrī, *ad-Daulah*, hlm. 231-232.

¹⁸Masudul Hasan, *History of Islam*, Jilid I (Delhi: Adam Publishers, 1995), hlm. 521.

¹⁹Maḥmūd Ismā‘īl, *al-Khawārij fī Bilād al-Magrib ḥattā Muntaṣaf al-Qarn ar-Rābi‘* (Magrib: Dār as-Ṣaqāfah, 1985), hlm. 116.

ibn Yazid. Mereka kemudian membunuhnya dan menggantinya dengan Abū al-Qāsim Samkū yang beraliran Ibādiyyah. Selanjutnya, ia digantikan anaknya yang bernama Ilyās yang juga dilengserkan dan digantikan saudaranya, Ilyasa‘, yang mampu memantapkan pemerintahannya. Ilyasa‘ memiliki putera bernama Midrār yang dinikahkan dengan Urwā, anak perempuan ‘Abd ar-Rahmān ibn Rustam. Setelah Ilyasa‘ meninggal pada tahun 208 H. (823 M.), ia digantikan oleh anaknya, Midrār. Pada tahun 253 H. (867 M.) anaknya, Maimūn, yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat Şufriyyah memberontak dan melengserkannya. Sejak itu hubungan Banū Midrār dan Rustamiyyah tidak harmonis. Pada tahun 263 H. (876 M.) Maimūn digantikan anaknya, Muhammad, yang menganut Ibādiyyah. Kepemimpinannya dilanjutkan Ilyasa‘ ibn Midrār pada tahun 270 H. (883 M.) hingga pada tahun 296 H. (909 M.) dihancurkan Abū ‘Abd Allāh al-Ḥusain ad-Dā‘ī asy-Syī‘ī.²⁰

Pengangkatan ‘Abd ar-Rahmān ibn Rustam sebagai pemimpin pertama Daulah Rustamiyyah terjadi pada tahun 160 H. atau 776 M.,²¹ sedangkan keruntuhan Daulah Rustamiyyah terjadi pada bulan Syawwāl 296 H. bertepatan dengan bulan Juni 909 M. ketika Yaqṣān ibn Abī al-Yaqṣān dikalahkan oleh Daulah Fāṭimiyyah di bawah komando Abū ‘Abd Allāh asy-Syī‘ī.²² Signifikansi Daulah Rustamiyyah dipertegas dengan stabilitas pemerintahan Daulah Rustamiyyah yang berlangsung selama lebih dari satu abad. Kemajuan ekonomi

²⁰ Al-Bārūnī, *al-Azhar*, Jilid II, hlm. 142-144; Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2005, hlm. 787; K. Ali, *A Study of Islamic History* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1980), hlm. 341; Ameer Ali, *A Short History of the Saracens* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994), hlm. 590-593; dan M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 191.

²¹ Al-Ḥarīrī, *ad-Daulah*, hlm. 94.

²² Ibn ‘Izārī, *al-Bayān*, Jilid I, hlm. 197.

dan intelektual diwujudkan dengan baik sehingga Tahert yang menjadi pusat pemerintahan Rustamiyyah disebut sebagai ‘Irāq al-Magrib, al-‘Irāq aṣ-Ṣagīr, atau *Balkh al-Magrib*.²³ Namun, sebagian besar literatur kurang menaruh perhatian secara mendalam terhadap kajian mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Rustamiyyah. Kebanyakan literatur hanya menampilkan kajian yang sepintas mengenai Daulah Rustamiyyah. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan kajian-kajian terhadap daulah lainnya dari kalangan Sunni maupun Syi‘ah.

Berdasarkan adanya keganjilan antara keanekaragaman kelompok Khawarij dan generalisasi masyarakat terhadap mereka, serta kesenjangan antara signifikansi keberhasilan Daulah Rustamiyyah Ibādiyyah dan minimnya karya ilmiah mengenai daulah ini, maka penulisan disertasi ini dilakukan. Dengan mengangkat tema pokok mengenai “Kebijakan Politik Daulah Rustamiyyah”, terutama yang terkait dengan kebijakan dalam negeri, maka dapat diungkapkan penjelasan mengenai kebijakan politik Daulah Rustamiyyah. Di antara kebijakan politik itu adalah permasalahan mengenai proses peralihan kekuasaan politik di dalam pemerintahan Daulah Rustamiyyah yang bertolak belakang dengan doktrin Ibādiyyah dan ajaran Khawarij pada umumnya. Persoalan ini juga menarik untuk dikaji karena daulah tersebut ternyata mengikuti tradisi monarki turun-temurun dalam pergantian penguasa politik.²⁴ Di samping itu, pembahasan kebijakan politik juga berhubungan dengan sikap

²³ Al-Bārūnī, *al-Azhar*, Jilid II, hlm. 49 dan al-Ḥarīrī, *ad-Daulah*, hlm. 234.

²⁴ Pemerintahan Rustamiyyah dipimpin oleh Ibn Rustam dan keturunannya. Sumber paling primer yang menyebutkannya ialah karya Ibn aṣ-Ṣagīr, *Akhbār al-A'immah ar-Rustamiyyīn* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1986).

Daulah Rustamiyyah terhadap pihak yang berbeda dari mereka, baik kalangan internal dari umat Islam atau eksternal dari selain umat Islam, misalnya berkenaan dengan kehidupan beragama, aktivitas ekonomi, dan penyelesaian konflik. Dengan demikian, dapat terungkap kesesuaian kebijakan Daulah Rustamiyyah dengan doktrin Ibādiyyah yang terkenal dengan moderasinya. Kebijakan politik luar negeri terkait dengan daulah-daulah lain hanya disinggung secara sekilas dalam pembahasan karena persoalan tersebut telah dikaji oleh al-Ḥarīrī dan Maḥmūd Ismā‘īl, sebagaimana diuraikan dalam kajian pustaka. Selanjutnya, disertasi ini menjelaskan latar belakang yang menyebabkan Daulah Rustamiyyah menerapkan kebijakan politik tersebut sehingga eksplanasi sejarah dapat tercapai secara mendalam.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini dirumuskan dengan pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana proses pembentukan pemerintahan Daulah Rustamiyyah hingga keruntuhannya di kawasan Magrib?
2. Bagaimana hubungan Daulah Rustamiyyah dengan Khawarij Ibādiyyah secara historis ideologis?
3. Bagaimana kebijakan politik Daulah Rustamiyyah mengenai suksesi pemerintahan, kehidupan beragama, aktivitas ekonomi, dan penyelesaian konflik, serta mengapa kebijakan politik itu diterapkan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan disertasi ini bertujuan untuk menerangkan proses terbentuknya kekuasaan politik Daulah Rustamiyyah sampai keruntuhannya di kawasan Magrib, hubungan historis ideologis Daulah Rustamiyyah dengan Khawarij Ibādiyyah, realisasi kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintahan Rustamiyyah, dan faktor yang mendorong pelaksanaan kebijakan politik daulah itu. Dengan melakukan kajian mendalam mengenai permasalahan ini, maka secara teoritis dapat diperoleh *historical explanation* (penjelasan sejarah) tentang aplikasi kebijakan politik Daulah Rustamiyyah dan latar belakangnya. Selain itu, secara pragmatis dapat dipetik nilai-nilai yang mempunyai faedah bagi kehidupan. Sejarah merupakan cermin masa lalu untuk dijadikan tuntunan bagi masa kini dan masa yang akan datang.²⁵ Di sinilah tampak fungsi pendidikan dalam sejarah yang meliputi antara lain sebagai pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, dan keindahan.²⁶ Jelaslah, sejarah merupakan guru kehidupan atau *historia magistra vitae*.²⁷ Ia mampu menyediakan *worthwhile guidelines* (garis-garis pedoman yang sangat berfaedah) bagi masa depan.²⁸

Dalam konteks yang demikian, penulisan disertasi ini bermanfaat untuk melengkapi sejarah Islam yang biasanya secara negatif cenderung mengidentikkan semua golongan Khawarij dengan aktivitas kekerasan,

²⁵Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 3.

²⁶Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1997), hlm. 24.

²⁷Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 16.

²⁸Donald V. Gawronski, *History: Meaning and Method* (Illinois: Scott, Foresman, and Company, 1969), hlm. 5.

radikalisme, dan ekstremisme, serta memandang sebelah mata terhadap kesuksesan mereka dalam merealisasikan kekuasaan politik dan mewujudkan kemajuan signifikan selama pemerintahannya. Setelah mengetahui persoalan tersebut, masyarakat saat ini dan yang akan datang dapat memandang tiap-tiap kelompok Khawarij dengan lebih arif dan proporsional, serta tidak gegabah untuk melakukan generalisasi seluruhnya terhadap mereka.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah disinggung di muka, literatur yang mengkaji Daulah Rustamiyyah secara mendalam tidak banyak. Selain ada sejarawan yang tidak menyebutkan eksistensi Daulah Rustamiyyah, terdapat pula sejarawan yang sekedar menyisipkannya secara sekilas dalam pembahasan lain. Meskipun demikian, dijumpai beberapa karya yang telah membahas Daulah Rustamiyyah.

Sebuah buku yang mengkaji Daulah Rustamiyyah dengan baik adalah karya Muhammad Ḥasan al-Harīrī berjudul *ad-Daulah ar-Rustamiyyah bi al-Magrib al-Islāmī: Haḍarātuhā wa ‘Alaqatuhā al-Khārijīyyah bi al-Magrib wa al-Andalus*. Tampaknya al-Harīrī lebih cenderung membahas persoalan-persoalan politik, seperti kondisi pemerintahan selama kepemimpinan para penguasa Daulah Rustamiyyah dan pergolakan politik yang terjadi dalam memperebutkan kekuasaan. Al-Harīrī juga menunjukkan keberhasilan Daulah Rustamiyyah pada bidang ekonomi (perdagangan) dan kegiatan keilmuan. Namun, aspek yang menerangkan latar belakang di balik kebijakan Rustamiyyah yang mampu mewujudkan kemajuan itu belum dielaborasi. Hubungan pemerintah Daulah

Rustamiyyah dengan kalangan selain umat Islam disebutkan pula secara sekilas. Al-Ḥarīrī menginformasikan sepintas mengenai adanya kelompok beragama Kristen di kalangan masyarakat yang dipimpin oleh Daulah Rustamiyyah yang mempunyai kedekatan dengan pemerintahan Abū Bakr ibn Aflah.²⁹ Ketika menjelaskan pengangkatan ‘Abd al-Wahhāb yang menggantikan ayahnya, ‘Abd ar-Rahmān ibn Rustam, sebagai pemimpin kerajaan, al-Ḥarīrī kurang menguraikannya secara memadai. Menurutnya, pemilihan ‘Abd al-Wahhāb disebabkan calon terkuat, yakni Mas‘ūd al-Andalusī yang menempati posisi pertama di atas ‘Abd al-Wahhāb, tidak muncul di hadapan khalayak pada waktu pembaiatannya. Mas‘ūd tidak mau menjabat sebagai pemimpin. Banyaknya pendukung yang berada di belakang ‘Abd al-Wahhāb dari kalangan suku Zanātah dan orang-orang Persia juga ikut berperan.³⁰ Oleh karena itu, di antara penjelasan yang kurang diungkapkan ialah mengenai faktor yang menyebabkan peristiwa sejarah. Meskipun ia mengkaji hubungan Daulah Rustamiyyah dengan daulah-daulah lainnya, namun terdapat hal yang masih belum terungkap dalam uraiannya. Misalnya, tentang hubungan Daulah Rustamiyyah tatkala dipimpin oleh Muhammad ibn al-Aflah atau Abū al-Yaqzān dengan Daulah ‘Abbāsiyah pada masa pemerintahan al-Mutawakkil, mengingat keduanya merupakan kawan dekat semasa di dalam penjara ‘Abbāsiyah.³¹ Demikian pula, ketika ia memaparkan hubungan Daulah Rustamiyyah dengan Daulah Idrīsiyyah yang hanya mendetail pada penjelasan mengenai hubungan kedua daulah pada masa

²⁹ Al-Ḥarīrī, *ad-Daulah*, hlm. 18.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

³¹ *Ibid.*, hlm. 190.

pemerintahan ‘Abd al-Wahhāb, sementara penguasa yang lain tidak dijelaskan.³²

Buku berikutnya yang membahas Daulah Rustamiyyah ialah karya Sulaimān Bāsyā al-Bārūnī berjudul *al-Azhār ar-Riyādiyyah fī A'immah wa Mulūk al-Ibādiyyah*. Buku ini sungguh berharga dan layak mendapatkan apresiasi. Penulisnya telah menjelaskan perkembangan Daulah Rustamiyyah. Penulisnya cenderung menguraikan pembahasan-pembahasannya berdasarkan pemaparan naratif deskriptif sehingga eksplanasi sejarahnya kurang maksimal.³³

Selanjutnya, terdapat buku *al-Ibādiyyah fī Maukib at-Tārīkh*, karya ‘Alī Yaḥyā Mu‘ammār. Karena penulisnya termasuk pengikut Ibādiyyah, maka penulisnya terkesan lebih mengutamakan pemaparan secara apologis. Sebagaimana kecenderungan *insider perspective* (pandangan orang dalam), penulis buku tersebut ketika memaparkan sejarah perkembangan Daulah Rustamiyyah lebih condong kepada uraian-uraian yang memuji Daulah Rustamiyyah dan berupaya keras untuk meminimalisasi kesan-kesan negatif yang melekat pada Daulah Rustamiyyah. Akibatnya, pandangan dan penilaian bias tidak dapat dihindarkan dalam penjelasan-penjelasannya. Misalnya, tatkala penulis menegaskan corak pemerintahan Daulah Rustamiyyah yang merupakan duplikasi pemerintahan al-Khulafā' ar-Rāsyidūn. Menurutnya, Daulah Rustamiyyah dalam melakukan peralihan kepemimpinan menggunakan mekanisme pemilihan rakyat secara bebas. Para penguasa Daulah Rustamiyyah yang bergelar *Amīr al-Mu'minīn* (pemimpin orang-orang beriman) sangat

³² *Ibid.*, hlm. 204.

³³ Al-Bārūnī, *al-Azhār*, Jilid II, hlm. 132-359.

mengutamakan musyawarah dalam menjalankan pemerintahan dan membahas permasalahan-permasalahan masyarakat.³⁴

Sikap seperti yang dilakukan Mu‘ammar ditunjukkan pula oleh Bukair ibn Balhāḥ di dalam karyanya berjudul *al-Imāmah ‘inda al-Ibādiyyah baina an-Nazariyyah wa at-Taṭbiq: Muqāranah ma‘a Ahl as-Sunnah wa al-Jamā‘ah*. Penulisnya jelas-jelas menyatakan sistem pemerintahan yang berlaku di Oman dan Tahert didirikan di atas pondasi *syūrā* (musyawarah) dan *ikhtiyār ḥurr* (pemilihan masyarakat secara bebas). Perputaran kepemimpinan politik Daulah Rustamiyyah yang hanya bergulir secara turun-temurun di antara keluarga ‘Abd ar-Rahmān ibn Rustam dapat dibenarkan dan diterima karena kebijakan itu diterapkan masyarakat Ibādiyyah untuk menghindari konflik politik.³⁵

Buku lain yang telah menyebut hubungan Khawarij Ibādiyyah dengan pemerintahan Daulah Rustamiyyah ialah *al-Khawārij fī Bilād al-Magrib ḥattā Muntaṣaf al-Qarn ar-Rābi‘*, karya Maḥmūd Ismā‘il. Karena buku ini mendeskripsikan secara keseluruhan sejarah panjang perkembangan golongan Khawarij yang berada di wilayah Magrib sejak permulaan sampai pertengahan abad IV H. (X M.), maka penjelasan sejarahnya kurang mendalam. Dua kelompok Khawarij yang dikaji perkembangannya dalam buku tersebut adalah Ṣufriyyah dan Ibādiyyah. Tatkala membahas Daulah Rustamiyyah, buku tersebut lebih banyak mendeskripsikan perselisihan-perselisihan politik selama

³⁴ Mu‘ammar, *al-Ibādiyyah*, Jilid II, hlm. 20.

³⁵ Bukair ibn Balhāḥ, *al-Imāmah ‘inda al-Ibādiyyah baina an-Nazariyyah wa at-Taṭbiq: Muqāranah ma‘a Ahl as-Sunnah wa al-Jamā‘ah*, Jilid II (Oman: Maktabat ad-Dāmirī, 2010), hlm. 619.

pemerintahan Daulah Rustamiyyah.³⁶ Pembahasan buku itu juga telah mengkaji persoalan mengenai hubungan Daulah Rustamiyyah dengan daulah-daulah lainnya, tetapi pemaparannya dalam menguraikan perkembangan hubungan tersebut kurang menekankan aspek periodesasi pemerintahan Daulah Rustamiyyah. Misalnya, tatkala mengkaji hubungan Daulah Rustamiyyah dengan Daulah ‘Abbāsiyyah yang secara umum digambarkan sebagai hubungan permusuhan,³⁷ padahal Abū al-Yaqzān menjalin persahabatan erat dengan Khalifah al-Mutawakkil. Selain itu, gambaran hubungan permusuhan itu kurang dijelaskan. Apakah permusuhan itu di segala aspek kehidupan atau hanya sebatas hubungan politis yang tidak menghalangi hubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kedua negeri itu? Demikian juga, ketika menguraikan hubungan Daulah Rustamiyyah dengan Daulah Umawiyyah II di Andalusia yang merupakan hubungan persahabatan, tanpa menjelaskan secara detail tentang hubungan kedua daulah setelah pemerintahan Abū al-Yaqzān.³⁸

Adapun Ibrāhīm Bahāz dalam karyanya berjudul *ad-Daulah ar-Rustamiyyah: Dirārah fī al-Aqdā‘ al-Iqtisādiyyah wa al-Hayāh al-Fikriyyah* memang menjelaskan mengenai keadaan perekonomian dan intelektual pada masa Daulah Rustamiyyah. Namun, di dalam buku tersebut belum dijumpai uraian tentang faktor yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan Daulah Rustamiyyah. Melalui korespondensi penulis dengan Ibrāhīm Bahāz via e-mail

³⁶Ismā‘il, *al-Khawārij*, hlm. 172.

³⁷*Ibid.*, hlm. 186.

³⁸*Ibid.*, hlm. 207.

pada tanggal 7 Juni 2011, diperoleh informasi mengenai ketiadaan penjelasan yang menerangkan motif penerapan kebijakan Dinasti Rustamiyyah.³⁹

Mengacu pada telaah pustaka di atas, hingga kini belum dijumpai kajian komprehensif dan mendalam mengenai kebijakan politik Daulah Rustamiyyah yang beraliran Khawarij Ibaḍiyyah beserta faktor yang menjadi pendorong bagi penerapan kebijakan politik tersebut. Selain itu, karena penulisan disertasi ini dilakukan dengan mempergunakan pendekatan behavioral dalam metode pembahasannya dengan menganalisis perilaku politik para penguasa Rustamiyyah dan alasan penerapan kebijakan mereka,⁴⁰ maka disertasi ini jelas berbeda dari tulisan-tulisan yang mirip dengannya. Oleh sebab itu, disertasi ini mengisi celah yang ada di antara kajian-kajian yang telah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam setiap pembahasan ilmu sejarah, eksplanasi atau penjelasan merupakan salah satu pusat utama yang menjadi sorotan. Eksplanasi digunakan oleh para sejarawan ketika mereka menyintesiskan fakta-fakta.⁴¹ Eksplanasi sejarah adalah usaha untuk membuat unit sejarah *intelligible* (dapat dimengerti secara cerdas).⁴² Menurut Helius Sjamsuddin, acapkali dalam penggunaan bahasa, istilah deskripsi dan eksplanasi disamakan. Dua istilah itu dianggap

³⁹Buku itu diterbitkan oleh penerbit Alpha, Aljazair, tahun 2010

⁴⁰Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 131 dan Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik* (Malang: SETARA Press, 2009), hlm. 14-15.

⁴¹Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 190.

⁴²Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 1-2 dan Gawronski, *History*, hlm. 2.

sinonim, walaupun keduanya sebenarnya dapat dibedakan. Fakta sejarah merupakan deskripsi mengenai masa lalu. Para sejarawan tidak berhenti pada pertanyaan deskriptif dengan jawaban faktual. Mereka ingin mengetahui lebih jauh mengenai hal-hal di balik fakta-fakta itu dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut jawaban analitis kritis demi memperoleh eksplanasi sejarah.⁴³

Melalui analisis kritis beranjak dari pertanyaan “mengapa”, penulisan sejarah dapat mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan suatu peristiwa.⁴⁴

Dalam rangka menuju kepada eksplanasi sejarah, maka perlu untuk mendekatkan kajian historis ini dengan konsep ilmu sosial. Menurut Kuntowijoyo, pengaruh kooperasi antara ilmu sejarah dan ilmu sosial adalah Sartono Kartodirdjo sejak 1967.⁴⁵ Bagi Kartodirdjo, sejarah deskriptif naratif sudah tidak lagi memuaskan untuk menjelaskan pelbagai masalah atau gejala yang serba kompleks, sedangkan pendekatan multidimensional atau *social scientific* dapat digunakan untuk menggarap permasalahan tersebut, karena ilmu-ilmu sosial menyediakan teori dan konsep yang sangat relevan untuk analisis historis.⁴⁶ Upaya *rapprochement* (saling pendekatan) antara ilmu sejarah dan ilmu sosial, menurut Sjamsuddin, ada hubungannya dengan ketidakpuasan para sejarawan sendiri dengan bentuk-bentuk historiografi lama yang ruang cakupannya terbatas. Historiografi baru dinilai dapat membuka ruang cakupan yang lebih luas.⁴⁷

⁴³Sjamsuddin, *Metodologi*, hlm.191-193.

⁴⁴Gawronski, *History*, hlm. 2 dan 7.

⁴⁵Kuntowijoyo, *Penjelasan*, hlm. 118.

⁴⁶Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 120.

⁴⁷Sjamsuddin, *Metodologi*, hlm. 300.

Manfaat ilmu sosial terhadap sejarah, menurut Kuntowijoyo, mencakup empat hal, yaitu konsep, teori, permasalahan, dan pendekatan dari ilmu sosial.⁴⁸ Salah satu ilmu yang termasuk bagian dari ilmu-ilmu sosial adalah ilmu politik. Mengikuti perkembangan penulisan sejarah, maka pemaparan deskriptif naratif pada sejarah politik gaya lama digantikan dengan analisis kritis ilmiah. Sejarah politik model yang baru telah menggunakan pendekatan dari berbagai ilmu-ilmu sosial. Cakrawala analisis sejarah politik kemudian menjadi semakin luas dan mendalam. Tidak hanya itu, perspektif politik juga menjadi lebih komprehensif dan multidimensional yang mencakup interdependensi proses politik dengan jaringan sosial, sistem ekonomi, sistem nilai, dan lain sebagainya.⁴⁹

Karena permasalahan dalam disertasi ini lebih menekankan pada kajian mengenai kebijakan politik Daulah Rustamiyyah, maka nuansa sejarah politiknya tidak dapat dihindari. Politik adalah ilmu tentang tata cara pemerintahan.⁵⁰ Pembahasannya mengenai pemerintah, negara, kekuasaan, kebijakan,⁵¹ kepemimpinan, otoritas, ideologi, organisasi, dan lain sebagainya.⁵² Di samping itu, cakupan dari *political history* (sejarah politik) antara lain ialah pengelolaan kekuasaan formal di dalam masyarakat atau negara, pengaturan institusi negara, persaingan faksi-faksi dan partai-partai untuk mengendalikan pemerintahan negara, kebijakan yang diberlakukan oleh negara, hubungan

⁴⁸Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 107-115.

⁴⁹Kartodirdjo, *Pendekatan*, hlm. 166 dan Sjamsuddin, *Metodologi*, hlm. 320.

⁵⁰Clarence Lewis Barnhart et al., *The World Book Dictionary*, Jilid II (Chicago: World Book, Inc, 2006), hlm. 1613.

⁵¹Ramlan Surbakti, "Pranata Politik" dalam *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (eds.) (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 279.

⁵²Kartodirdjo, *Pendekatan*, hlm. 150.

dengan negara-negara lain, juga signifikansi latar belakang sosial dan ekonomi elit politik beserta peranan publik opini.⁵³

Pendekatan yang dipergunakan disertasi ini dalam rangka mendeskripsikan kebijakan politik Daulah Rustamiyyah dan mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan kebijakan politik tersebut adalah *behavioral approach* (pendekatan behavioral).⁵⁴ Pemilihan pendekatan behavioral disebabkan pendekatan ini, menurut Surbakti dan Hidajat, merupakan pendekatan yang menekankan pada analisis berdasarkan pengetahuan mengenai kelakuan (perilaku) politik yang dilakukan individu maupun kelompok dan proses-proses kebijakannya.⁵⁵ Pendekatan ini menfokuskan kajian pada tingkah laku politik.⁵⁶ Dalam kajian politik, pendekatan ini dipelopori oleh Gabriel A. Almond, David Easton, Karl W. Deutsch, David Truman, dan Robert Dahl. Karakteristik menonjol pendekatan ini, sebagaimana dinyatakan A. Hoogerwerf dan Miriam Budiardjo, adalah *regularities* (keteraturan). Dalam perspektif ini, kelakuan politik menunjukkan

⁵³ Akh. Minhaji, *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009), hlm. 71-72.

⁵⁴ Dalam ilmu psikologi, dijumpai pula pendekatan behavioral yang diterapkan oleh pengaruh behavioralisme. Tokoh-tokohnya ialah John B. Watson, Ivan Petrovic Pavlov, William Mc Dougall, John Watson, Clark L. Hull, B. F. Skinner, dan Albert Bandura. Aliran ini memandang bahwa perilaku manusia bersifat teratur dan dapat dikendalikan melalui *conditioning* (pelaziman). Perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan. Douglas A. Bernstein dan Peggy W. Nash, *Essentials of Psychology* (New York: Houghton Mifflin Company, 1999), hlm. 8 dan Mursidin, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117-119.

⁵⁵ Surbakti, *Memahami*, hlm. 131 dan Hidajat, *Teori*, hlm. 14-15.

⁵⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 5; David Marsh dan Gerry Stokker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, terj. Helmi Mahadi dan Shohifullah (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 53; dan A. A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 21.

keteraturan yang dapat dirumuskan dalam generalisasi.⁵⁷ Dengan keteraturan itu, gejala-gejala suatu peristiwa yang sama terjadi di mana saja secara acak.⁵⁸ Kesamaan-kesamaan itulah yang berlaku secara umum sehingga dapat ditarik generalisasi atau hukum-hukum yang bersifat umum.⁵⁹ Terkait dengan penerapan kebijakan politik, aspek keteraturan perilaku politik semakin jelas ketika corak perilaku politik cenderung tidak keluar dari bingkai konsep atau teori tersebut. Dalam hal ini, ia tunduk kepada *covering laws* (hukum-hukum yang mencakup) atau *general laws* (hukum-hukum umum)⁶⁰ yang bersangkutan dengannya. Oleh karena itu, suatu kebijakan politik di tempat dan waktu tertentu sering mempunyai kemiripan dalam beberapa sisi dengan kebijakan politik di tempat dan waktu yang lain. Terkait dengan pemerintahan Rustamiyyah, pendekatan ini dapat dipergunakan untuk mengetahui kesamaan (keteraturan) perilaku dan kebijakan politik semua penguasa Rustamiyyah sepanjang kepemimpinan mereka. Penjelasan tentang perilaku politik kemudian banyak mempergunakan konsep atau teori yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang terdapat dalam disertasi ini dan tunduk pada batasan yang ditentukan di dalamnya.

Dalam tulisan ini, definisi kebijakan politik adalah segala keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang berlaku secara umum. Ia dipahami pula sebagai keputusan politik yang mengikat dan

⁵⁷Budiardjo, *Dasar*, hlm. 5 dan A. Hoogerwerf, *Politikologi*, terj. R. L. L. Tobing (Jakarta: Erlangga, 1979), hlm. 25.

⁵⁸Kuntowijoyo, *Penjelasan*, hlm. 12.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 98.

⁶⁰*Ibid.*

mempengaruhi masyarakat umum.⁶¹ Selanjutnya, kebijakan pemerintah dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu regulatif, redistributif, distributif, dan konstituen.⁶² Kebijakan regulatif dilakukan apabila kebijakan itu mengandung paksaan dan diterapkan secara langsung terhadap individu. Kebijakan regulatif dibuat pemerintah untuk mencegah individu supaya tidak melakukan suatu tindakan yang dilarang. Di samping itu, kebijakan regulatif diterapkan untuk memaksa individu agar melakukan tindakan tertentu supaya kepentingan umum tidak terganggu, misalnya berbagai bentuk perizinan dalam menggunakan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan redistributif ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara. Pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan redistributif. Kebijakan distributif ditandai dengan adanya pengenaan paksaan secara tidak langsung, tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu. Individu dapat menarik manfaat dari kebijakan itu, meskipun tidak dikenakan paksaan kepada individu untuk menggunakannya. Contohnya ialah penggunaan anggaran belanja negara atau daerah untuk memberikan manfaat secara langsung kepada individu, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas jalan raya. Kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan secara tidak langsung, yakni melalui lingkungan. Kebijakan konstituen mencakup dua lingkup garapan, yaitu lingkup urusan keamanan nasional dan

⁶¹Surbakti, *Memahami*, hlm. 190.

⁶²*Ibid.*, hlm. 193.

luar negeri yang mencakup pertahanan keamanan, ketertiban umum, diplomasi, penerangan luar negeri dari kementerian luar negeri, serta lingkup urusan berbagai dinas pelayanan administrasi.⁶³

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses kebijakan secara umum antara lain ialah lingkungan, persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas masyarakat perihal kebijakan, ideologi, konstitusi, latar belakang pribadi pembuat keputusan, informasi yang tersedia, golongan pendukung pembuat keputusan, dan adanya keputusan yang telah ada sebelumnya. Faktor-faktor tersebut dalam realitasnya terkadang bersifat saling mempengaruhi.⁶⁴ Di samping itu, dilakukan pula analisis dengan merujuk pada pendapat Weber, sebagaimana dikutip Kartodirdjo, tentang motif tindakan dalam rangka mengungkapkan motif kebijakan. Motif adalah konteks arti atau *Sinnszusammenhang* yang bagi individu yang sedang bertindak atau bagi penyelidik merupakan dasar yang penuh arti bagi kelakuan tersebut. Berdasarkan aspek motivasi, Weber mengemukakan empat macam tipe ideal kelakuan fundamental, yaitu tradisional (mengikuti kebiasaan yang sudah lazim), afektif (lebih bersifat emosional), bernilai (didasari kepercayaan yang penuh kesadaran terhadap nilai-nilai etis, estetis, religius, atau nilai mutlak tanpa memandang konsekuensi-konsekuensinya), dan bertujuan (untuk mencapai tujuan atau maksud yang diinginkan).⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, hlm. 193-194.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 194-195.

⁶⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 55.

Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan politik Daulah Rustamiyyah dengan doktrin Ibādiyyah yang bercorak moderat, maka perhatian ditujukan kepada *value system* (sistem nilai)⁶⁶ yang melandasi pemerintahan Rustamiyyah itu. Oleh karena itu, pendekatan keagamaan juga dipergunakan dalam disertasi ini. Agama (ideologi) secara substansial merupakan kepercayaan dan doktrin, sedangkan ia secara fungsional mempunyai peranan penting bagi penganutnya.⁶⁷ Di dalamnya terkandung pula aspek *social and political involvement* (keterlibatan sosial dan politik) yang mendorong penganutnya untuk mengimplementasikan dan memperjuangkan keyakinannya dalam kehidupan sosial dan politik.⁶⁸ Oleh karena itu, ia dapat mendorong perubahan sosial.⁶⁹ Dengan pendekatan keagamaan ini, maka corak integratif-interkoneksi⁷⁰ dalam disertasi ini semakin jelas.

Selanjutnya, untuk memperjelas perihal moderasi yang merupakan karakter utama Ibādiyyah, maka berikut ini diuraikan pengertian moderasi (*moderation* atau *i'tidal*). Makna moderasi adalah suatu sikap yang cenderung menghindari ekstremisme dan radikalisme dalam bertindak.⁷¹ Antonim dari moderasi adalah ekstremisme (*extremism* atau *tatarruf*), yakni suatu sikap yang berlebih-lebihan dan melampaui batasan selayaknya, dibarengi dengan

⁶⁶Gawronski, *History*, hlm. 15.

⁶⁷Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Jogjakarta: Ombak, 2011), hlm. 20 dan Keith A. Roberts, *Religion in Sociological Perspective* (California: Wadsworth Publishing Company, 1995), hlm. 25-26.

⁶⁸Roberts, *Religion*, hlm. 6 dan Frank Whaling, “Theological Approaches” dalam *Approaches to the Study of Religion*, Peter Connolly (ed.) (London: Cassel, 1999), hlm. 234.

⁶⁹Roberts, *Religion*, hlm. 232.

⁷⁰Abdurahman, *Metodologi*, hlm. 50.

⁷¹David Bernard Guralnik dan Victoria Neufeldt, (eds.), *Webster's New World College Dictionary*, Edisi III (New York: A Simon & Schuster Macmillan Company, 1996), hlm. 871.

penolakan terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan, serta tidak memberikan ruang terhadap toleransi.⁷² Oleh karena itu, di antara kriteria yang melekat pada moderasi ialah tidak bersifat ekstrem, menghindari tindakan radikal, menghormati pluralitas pendapat, menghargai perbedaan keyakinan, dan menjunjung tinggi toleransi. Konsep moderasi inilah yang dipakai untuk mengukur kadar moderasi kebijakan politik Rustamiyyah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah metode sejarah.⁷³ Langkah-langkah yang ditempuh diawali dengan pemilihan topik, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, verifikasi, interpretasi, dan diakhiri dengan penulisan laporan.⁷⁴ Tema tentang kebijakan Rustamiyyah dipilih, mengingat tema ini belum banyak dikaji dan sumber primernya tersedia sehingga ia sangat signifikan dan bersifat *workable* (dapat dikerjakan).⁷⁵ Dalam konteks pembahasan mengenai penerapan kebijakan politik Daulah Rustamiyyah yang berlangsung pada masa Islam klasik,⁷⁶ maka data yang dikumpulkan pada tahap heuristik⁷⁷ berkaitan dengan dokumen tertulis.⁷⁸

⁷²Khaṣīl ‘Alī Ḥaidar, *I‘tidāl am Taṭarruf: Ta‘ammulāt Naqdiyyah fi Tayyār al-Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah* (Kuwait: Dār Qirṭas li an-Nasyr, 1988), hlm. 27-28.

⁷³Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 39.

⁷⁴Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 89 dan Hasan ‘Uṣmān, *Manhaj al-Baḥṣ at-Tārīkhī* (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1976), hlm. 20.

⁷⁵Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 90.

⁷⁶Periode ini antara abad I – VII H. atau VII – XIII M. Grunebaum, *Classical Islam*, hlm. 1.

⁷⁷Sjamsuddin, *Metodologi*, hlm. 85-86.

⁷⁸Data biasanya dibedakan menjadi primer dan sekunder. Data primer adalah data yang disampaikan oleh saksi mata, sedangkan data sekunder adalah data yang disampaikan oleh sumber yang bukan saksi mata. Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 96 dan Gottschalk, *Mengerti*, hlm. 43.

Referensi yang dijadikan rujukan dalam disertasi ini secara umum dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni mengenai keadaan pemerintahan Daulah Rustamiyyah dan sejarah Khawarij Ibādiyyah yang menjadi ideologi daulah itu. Literatur utama yang dijadikan referensi primer dalam kajian ini adalah *Akhbār al-A'imma ar-Rustamiyyīn*, karya Ibn as-Sagīr, sejarawan yang hidup pada masa pemerintahan Daulah Rustamiyyah. Ia bahkan pernah mengikuti secara langsung suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh Abū al-Yaqzān ibn Aflah bersama masyarakat yang dipimpinnya. Dalam rangka mempertajam pembahasan, maka dipergunakan referensi-referensi sekunder yang mempunyai relevansi dengan tema disertasi ini. Sebagian dari buku-buku tersebut telah disebutkan di dalam kajian pustaka.

Tahapan verifikasi atau kritik sumber sejarah⁷⁹ terhadap referensi primer tidak dilakukan secara sepenuhnya dalam disertasi ini. Buku *Akhbār al-A'imma ar-Rustamiyyīn* sudah mengalami *tahqīq* (penyuntingan) sebanyak dua kali. Penyuntingan pertama dilakukan oleh seorang orientalis bernama A. de C. Motylinski pada tahun 1905, sedangkan penyuntingan berikutnya dilaksanakan oleh Muhammad Nāṣir dan Ibrāhīm Bahāz pada 1985.⁸⁰ Selanjutnya, untuk memahami informasi yang terkandung di dalam sumber data, maka dilakukan langkah interpretasi (penafsiran). Suatu data tidak dapat

⁷⁹Kritik sumber mencakup kritik ekstern untuk menguji otentisitasnya dan kritik intern untuk menguji kesahihan atau kredibilitasnya. Gottschalk, *Mengerti*, hlm. 95 dan 112; Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 99; ‘Usmān, *Manhaj*, hlm. 83; Sjamsuddin, *Metodologi*, hlm. 130-131; dan Abdurahman, *Metodologi*, hlm. 68.

⁸⁰Ibn as-Sagīr, *Akhbār*, hlm. 8 dan 11.

berbicara, kecuali melalui interpretasi.⁸¹ Perbandingan antara keterangan yang terdapat dalam sumber primer dan sumber penunjangnya juga dilakukan untuk menuju langkah interpretasi itu.⁸²

Tahapan historiografi atau penulisan historis dilakukan dengan memperhatikan aspek kronologisnya⁸³ yang mencakup pengantar, hasil penelitian, dan simpulan.⁸⁴ Oleh karena itu, pemaparan mengenai permasalahan utama disertasi ini diuraikan secara periodik berdasarkan periodesasi pemerintahan Daulah Rustamiyyah sehingga dapat mengakomodasi aspek prosesual dan diakronis dari historiografinya. Dalam disertasi ini dipergunakan aplikasi program *Islamic Calendar - Hijri Date Converter*, yang dianggap memiliki akurasi penghitungan, untuk melakukan konversi penanggalan Islam Hijriah menjadi penanggalan Masehi Gregorian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika disertasi ini terbagi menjadi lima bab yang integral.

Bab I merupakan pendahuluan disertasi. Ia menjadi acuan dalam penulisan disertasi ini. Ia memaparkan alasan yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat tema mengenai kebijakan politik Rustamiyyah,

⁸¹ Interpretasi biasanya dilakukan dengan analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan), walaupun kadang-kadang perbedaan keduanya dapat diabaikan. Contoh analisis ialah ketika ditemukan daftar pengurus suatu ormas yang menginformasikan adanya petani, pedagang, pegawai negeri, guru, tukang, dan mandor, kemudian diinterpretasikan bahwa ormas itu bersifat terbuka. Contoh sintesis adalah tatkala dijumpai data yang menerangkan pertempuran, rapat-rapat, mobilisasi massa, penggantian pejabat, pembunuhan, kemudian ditafsirkan bahwa saat itu telah terjadi peristiwa revolusi. Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 100-102.

⁸² Abdurahman, *Metodologi*, hlm. 74.

⁸³ Gottschalk, *Mengerti*, hlm. 174.

⁸⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 102-104.

permasalahan-permasalahan utama yang dibahasnya, tujuan yang hendak dicapainya, manfaat yang diperoleh dari penulisan disertasi, penelaahan kepustakaan terhadap karya-karya sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan tema bahasan, kerangka teori yang dipergunakan untuk menganalisis data, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah pembahasan, dan sistematika pembahasan yang diterapkan dalam disertasi ini.

Bab II merupakan pembahasan yang bersifat pengantar untuk menerangkan profil Daulah Rustamiyyah. Bab ini diawali dengan uraian mengenai kondisi sosial politik periode klasik secara global pada saat pemerintahan Rustamiyyah menunjukkan eksistensinya sehingga dapat menjelaskan situasi yang melingkupi perjalanan daulah ini dan posisinya di antara daulah-daulah Islam lainnya. Bab ini kemudian mengungkapkan proses yang dilalui masyarakat Ibādiyyah dalam rangka pembentukan daulah Rustamiyyah di kawasan Magrib dan pemerintahan yang dijalankan oleh para pemimpin Rustamiyyah semenjak ‘Abd ar-Rahmān ibn Rustam sampai al-Yaqzān ibn Abī al-Yaqzān.

Bab III merupakan pembahasan lanjutan yang mengkaji kaitan antara Daulah Rustamiyyah dan Khawarij Ibādiyyah secara historis dan ideologis. Bab ini melakukan penelusuran sejarah mengenai latar belakang kemunculan Khawarij di dunia Islam dan menjelaskan perkembangannya. Ia menguraikan asal-usul sekte Ibādiyyah yang menjadi ideologi pemerintahan Rustamiyyah dan selanjutnya menjelaskan doktrin keagamaan maupun politik Ibādiyyah.

Bab IV merupakan pembahasan inti yang menjadi tujuan utama penulisan disertasi ini. Ia mengkaji penerapan kebijakan politik selama pemerintahan Daulah Rustamiyyah. Kebijakan politik yang dianalisis dalam bab ini berkaitan dengan proses suksesi kekuasaan, kehidupan beragama, kehidupan ekonomi, dan penyelesaian konflik. Setelah pemaparan kebijakan politik, ia selanjutnya menjelaskan alasan yang memotivasi penerapan kebijakan politik tersebut.

Bab V merupakan penutup disertasi. Bab ini memuat kesimpulan yang disarikan dari seluruh pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ia juga dilengkapi dengan saran untuk dapat ditindaklanjuti setelah penyelesaian disertasi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, akhirnya disimpulkan sebagai berikut.

1. Daulah Rustamiyyah didirikan pada tahun 160 H. (776 M.) oleh ‘Abd ar-Rahmān ibn Rustam yang secara genealogis merupakan keturunan bangsa Persia. Kawasan Magrib telah menjadi tempat penyebaran dakwah Khawarij Ibādiyyah sebelum pemerintahan Rustamiyyah terbentuk. Kekuasaan politik Rustamiyyah yang diraih dengan perjuangan keras dan dijalankan oleh keturunan Ibn Rustam berakhir pada tahun 296 H. (909 M.) setelah dihancurkan oleh Daulah Fāṭimiyyah.
2. Daulah Rustamiyyah mempunyai hubungan sangat erat dengan Khawarij Ibādiyyah secara historis dan ideologis. Khawarij yang kemunculannya dipengaruhi berbagai faktor terpecah menjadi banyak sekte. Ibādiyyah merupakan sekte Khawarij yang paling moderat. Dakwah Ibādiyyah di kawasan Magrib mendapat sambutan positif dari penduduk Berber. Setelah melalui berbagai kendala, masyarakat Ibādiyyah berhasil mendirikan pemerintahan Rustamiyyah yang menjadikan Ibādiyyah sebagai ideologi pemerintahannya.
3. Kebijakan politik pemerintahan Rustamiyyah yang berhubungan dengan suksesi kepemimpinan berlawanan dengan doktrin Ibādiyyah, yakni siapa

saja yang telah memenuhi syarat tertentu boleh dipilih menjadi pemimpin umat Islam, tanpa mengistimewakan nasab tertentu. Kebijakan suksesi pemerintahan masih terbatas pada keturunan Ibn Rustam. Kebijakan itu dipengaruhi oleh berbagai alasan politis. Pertama, perbandingan penduduk dari Persia yang lebih sedikit daripada penduduk Berber sehingga masyarakat dapat dengan mudah melengserkan pemimpin jika melakukan penyimpangan dari syari‘ah selama menjalankan kepemimpinannya. Kedua, pengaruh dari tradisi pemerintahan waktu itu yang cenderung menerapkan suksesi kekuasaan secara turun temurun. Ketiga, pengaruh kuat masyarakat Nafūsah terhadap pemerintahan Rustamiyyah.

Kebijakan politik yang berkaitan dengan kehidupan beragama, perekonomian, dan penyelesaian konflik cenderung dilandasi oleh motif ideologis Ibādiyyah yang menekankan pada pengutamaan sikap moderat berdasarkan asas kebebasan, toleransi, keadilan, dan upaya optimal untuk menghindari kekerasan. Seluruh masyarakat yang mempunyai latar belakang plural diberi keleluasaan untuk hidup dengan tetap menaati ketentuan yang berlaku di wilayah Rustamiyyah.

Dalam bidang keagamaan, pemerintah memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama maupun mazhab masing-masing. Pemerintah menfasilitasi penyelenggaraan forum diskusi dan perdebatan yang dilakukan antara para pengikut mazhab tersebut. Sebagai mazhab pemerintah dan mayoritas, maka secara alamiah Ibādiyyah cenderung lebih didukung oleh pemerintah.

Dalam aspek perekonomian, pemerintah menjamin aktivitas ekonomi semua masyarakat selama aktivitasnya tidak bertentangan dengan ketentuan syari‘ah. Pemerintah melindungi keamanan, menyediakan sarana prasarana, serta mengoptimalkan potensi lingkungan geografis, yakni letaknya yang sangat strategis dan sumber daya alam yang berlimpah. Selanjutnya pemerintah memanfaatkan kemajuan ekonomi yang diperolehnya secara maksimal untuk memenuhi kepentingan negara dan masyarakat luas.

Adapun dalam kebijakan mengenai penyelesaian konflik, pemerintah senantiasa mengawalinya dengan langkah persuasif berupa peringatan hingga ancaman, kemudian bila perlu melibatkan pihak ketiga sebagai penengah konflik, dan terakhir bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang membahayakan stabilitas umum. Di samping itu, pemerintah kadang berinisiatif mengusulkan penyelenggaraan diplomasi pada saat konflik bersenjata sedang berkecamuk. Hal itu dilakukan demi mewujudkan perdamaian.

Pemerintah Rustamiyyah di satu sisi menerapkan doktrin moderasi Ibādiyyah, tetapi di sisi lain tidak mengimplementasikan doktrin Ibādiyyah mengenai suksesi pemerintahan. Doktrin moderasi berhasil menginspirasi dan mewarnai kepemimpinan Rustamiyyah. Sebaliknya, doktrin suksesi tidak mampu diaplikasikan oleh Rustamiyyah ketika mereka berkuasa. Idealisme doktrin suksesi tidak berdaya di hadapan pragmatisme politik.

B. Saran

Khawarij Ibādiyyah berhasil mewujudkan kekuasaan politik dengan mendirikan Daulah Rustamiyyah. Kontribusi signifikan yang diberikan Rustamiyyah pada sejarah dunia Islam merupakan prestasi yang layak diapresiasi. Oleh karena itu, informasi seputar prestasi pemerintahan Rustamiyyah semestinya dipublikasikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak menggeneralisasi semua mazhab Khawarij bersikap ekstrem, radikal, atau senantiasa mengedepankan kekerasan dalam menyampaikan keyakinannya.

Setelah mengetahui manfaat sikap moderat dalam rangka mempertahankan eksistensi diri, maka sudah selayaknya dilakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih mengutamakan sikap moderat daripada tindakan kekerasan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga kehidupan ini dapat berjalan secara harmonis dan damai. Meskipun mengedepankan moderasi, tetapi hal itu tidak menghalangi penerapan ketegasan dalam bersikap demi memelihara ketertiban dan menjaga kepentingan bersama. Di samping itu, penelitian berikutnya perlu dilakukan. Misalnya, pembahasan mengenai kondisi masyarakat Ibādiyyah pada masa sekarang atau perbandingan antara pemerintahan Ibādiyyah di Magrib dan Oman. Dengan demikian, kajian tentang Ibādiyyah semakin lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- _____. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Jogjakarta: Ombak, 2011.
- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Tārīkh al-Mažāhib al-Islāmiyyah fī as-Siyāsah wa al-‘Aqā’id*. Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1946.
- Albana, Jamal. *Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*, terj. Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Ali, Ameer. *A Short History of the Saracens*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.
- Ali, K. *A Study of Islamic History*. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1980.
- Amīnī, Ibrāhīm al-. *Dirāsah ‘Āmmah fī al-Imāmah*, terj. Kamāl as-Sayyid. Qum: Mu'assasah Anṣāriyān, 2005.
- Armstrong, Karen. *Islam: A Short History*. New York: Modern Library, 2002.
- ‘Aṭā’ Allāh, Khidr Ahmād. *Bait al-Hikmah fī ‘Aṣr al-‘Abbāsiyyīn*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t. t.
- Bahnasāwī, Sālim al-. *Al-Khilāfah wa al-Khulafā’ ar-Rāsyidūn baina asy-Syūrā wa ad-Dīmuqrātiyyah*. Kairo: az-Zahrā', 1991.
- Baiṭar, Amīnah. *Tārīkh al-‘Aṣr al-‘Abbāsi*. Damaskus: Maṭba‘ah Jāmi‘ah Dimashq, 1980.
- Bakhsh, S. Khuda. *Politics in Islam*. Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1981.
- Balāzurī, Ahmād ibn Yaḥyā al-. *Futūḥ al-Buldān*. Kairo: Maktabat an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1956.
- Barnhart, Clarence Lewis, et al. *The World Book Dictionary*. Chicago: World Book, Inc, 2006.
- Bārūnī, Sulaimān Bāsyā al-. *Al-Azhār ar-Riyādiyyah fī A’immah wa Mulūk al-Ibādiyyah*. Oman: Salṭanah ‘Umān, 1987.

- Bernstein, Douglas A. dan Peggy W. Nash. *Essentials of Psychology*. New York: Houghton Mifflin Company, 1999.
- Bosworth, Clifford Edmund. *The Islamic Dynasties*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliyah, 1998.
- Diyūhjī, Sa'īd ad-. *Bait al-Hikmah*. Mosul: Dār al-Kutub, 1972.
- Faqqī, 'Iṣām ad-Dīn 'Abd ar-Ra'ūf al-. *Tārīkh al-Magrib wa al-Andalus*. Kairo: Maktabat Nahḍah asy-Syarq, 1990.
- Farrā', Abū Ya'lā Muḥammad ibn al-Ḥusain al-. *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Fauzī, Fārūq 'Umar. *Al-Imāmah al-Ibādiyyah fī 'Umān*. Oman: Jāmi‘ah Ḫālid Bait, 1997.
- Frye, R. N. "Balkh" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, H. A. R. Gibb, J. H. Kramers, E. Levi-Provencal, dan J. Schacht (eds.), Jilid I. Leiden: E. J. Brill, 1960, hlm. 1000-1002.
- Gatara, A.A. Said dan Moh. Dzulkiah Said. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Gawronski, Donald V. *History: Meaning and Method*. Illinois: Scott, Foresman, and Company, 1969.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Grunebaum, G. E. Von. *Classical Islam: A History 600-1258*, terj. Katherine Watson. London: George Allen and Unwin, 1970.
- Guralnik, David Bernard dan Victoria Neufeldt, (eds.). *Webster's New World College Dictionary*, Edisi III. New York: A Simon & Schuster Macmillan Company, 1996.
- Ḩaidar, Khalīl 'Alī. *I'tidāl am Taṭarruf: Ta'ammulāt Naqdīyyah fī Tayyār al-Wasaṭīyyah al-Islāmiyyah*. Kuwait: Dār Qirtās li an-Nasyr, 1988.
- Haikal, Muḥammad Husain. *Al-Fārūq 'Umar*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 2000.

- _____. *As-Siddiq Abū Bakr*. Mesir: Matābi‘ al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1982.
- _____. *Hayāh Muḥammad*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1977.
- _____. ‘Uṣmān ibn ‘Affān. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1964.
- Ḩafīm, Rajab Muḥammad ‘Abd al-. *Ar-Riddah fī Maṣhūm Jadīd*. Kairo: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1985.
- Ḩamawī, Yāqūt ibn ‘Abd Allāh al-. *Mu‘jam al-Buldān*. Beirut: Dār Ṣādir, 1977.
- Ḩarīrī, Muḥammad ‘Isā al-. *Ad-Daulah ar-Rustamiyyah bi al-Magrib al-Islāmī: Haḍāratuhā wa ‘Alāqatuhā al-Kharījiyyah bi al-Magrib wa al-Andalus*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1987.
- Ḩasan, Ibrāhīm Ḥasan. *Tārīkh al-Islām as-Siyāṣī, wa ad-Dīnī, wa aṣ-Ṣaqāfī, wa al-Ijtīmā‘ī*. Kairo: Maktabat an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1964.
- Hasan, Masudul. *History of Islam*. Delhi: Adam Publishers, 1995.
- Hāsyimī, Sa‘dī Mahdī al-. *Ibn Saba’ Haqqīqah lā Khayāl*. Madinah: Maktabat ad-Dār, 1985.
- Hawkins, Joyce M. *Al-Muhit Oxford Study Dictionary*. Beirut: Academia, 2003.
- Hawting, G. R. *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750*. London: Roudlege, 2000.
- Hidajat, Imam. *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA Press, 2009.
- Hifzī, ‘Abd al-Laṭīf al-. *Ta’sīr al-Mu’tazilah fī al-Khawārij wa asy-Syī‘ah: Asbābuḥ wa Mazarīruḥ*. Jeddah: Dār al-Andalus al-Khaḍrā’, 2000.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi, 2005.
- Hoogerwerf, A. *Politikologi*, terj. R. L. L. Tobing. Jakarta: Erlangga, 1979.
- Ibn al-‘Arabī, al-Qādī Abū Bakr. *al-‘Awāṣim min al-Qawāṣim fī Ṣaubih al-Jadīd: Tahqīq fī Mawāqif as-Saḥābah*. Qatar: Dār aṣ-Ṣaqāfah, 1989.
- Ibn al-Asīr, Abū al-Ḥasan ‘Afī. *Al-Kāmil fī at-Tārīkh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

- Ibn aş-Şagīr. *Akhbār al-A'immah ar-Rustamiyyīn*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1986.
- Ibn Balhāḥ, Bukair. *Al-Imāmah 'inda al-Ibādiyyah baina an-Nazariyyah wa at-Taṭbiq: Muqāranah ma'a Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Oman: Maktabat ad-Dāmirī, 2010.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Al-Musnad*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ibn 'Izārī. *Al-Bayān al-Mugrib fī Akhbār al-Andalus wa al-Magrib*. Leiden: E. J. Brill, 1948.
- Ibn Kaśīr, Abū al-Fidā' al-Ḥāfiẓ. *Al-Bidāyah wa an-Nihāyah*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2006.
- Ibn Khaldūn, 'Abd ar-Rahmān ibn Muḥammad. *Tārīkh Ibn Khaldūn*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Isfarāinī, Abū al-Muzaffar al-. *At-Tabṣīr fī ad-Dīn wa Tamyīz al-Firqah an-Nājiyah 'an al-Firaq al-Hālikīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Ismā'īl, Maḥmūd. *Al-Agālibah: Siyāsatuhum al-Khārijiyah*. Fez: 'Ain li ad-Dirāsat wa al-Buḥūs al-Insāniyyah wa al-Ijtima'iyyah, 2000.
- _____. *Al-Harakāt as-Sirriyyah fī al-Islām*. Kairo: Ru'yah, 2006.
- _____. *Al-Khawārij fī Bilād al-Magrib hattā Muntaṣaf al-Qarn ar-Rābi'*. Magrib: Dār as-Šaqāfah, 1985.
- Ja'bārī, Farḥāt ibn 'Afī al-. *Syakhṣiyyāt Ibādiyyah*. Seeb: Maktabat ad-Dāmirī, 2010.
- Jahlān, 'Adūn. *Al-Fikr as-Siyāsī 'ind al-Ibādiyyah*. Seeb: Maktabat ad-Dāmirī, t. t.
- Ja'lī, Aḥmad Muḥammad Aḥmad. *Dirāsah 'an al-Firaq wa Tārīkh al-Muslimīn: al-Khawārij wa asy-Syī'ah*. Riyadh: Markaz al-Malik Faiṣal li al-Buḥūs wa ad-Dirāsat al-Islāmiyyah, 1988.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- _____. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1993.

- Kaye, A. S. "Bilād al-Sūdān" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, C. E. Bosworth, E. Van Donzel, W. P. Heinrichs, dan G. Lecomte (eds.), Jilid IX. Leiden: E. J. Brill, 1997, hlm.752-761.
- Kelly, J. B. "Khaṭīfa" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, E. Van Donzel, B. Lewis, dan CH. Pellat (eds.), Jilid IV. Leiden: E. J. Brill, 1990, hlm. 937-954.
- Kenney, Jeffrey, T. *Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Khaṣifāt, ‘Iwad Muḥammad. *Al-Uṣūl al-Tārīkhīyyah li al-Firqah al-Ibādiyyah*. Seeb: Wizārat al-Turās al-Qaumī wa aṣ-Šaqāfah, 1994.
- Khan, Muhammad Abdur Rahman. *Sumbangan Umat Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan*, terj. Adang Affandi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Khaṭṭāb, Maḥmūd Syīt. *Qādat Fath al-Magrib al-‘Arabī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1997.
- _____. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Wacana, 2008.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Lewicki, Tadeusz. "Al-Ibādiyya" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, B. Lewis, V. L. Menage, CH. Pellat, dan J. Schacht (eds.), Jilid III. Leiden: E. J. Brill, 1971, hlm. 648-660.
- Lombard, Maurice. *The Golden Age of Islam*, terj. Joan Spencer. Princeton: Markus Wiener Publishers, 2004.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ma‘lūf, Louis, et al. *Al-Munjid fī al-Lugah*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1996.
- Ma‘rūf, Ahmād Sulaimān. *Qirā'ah Jadīdah fī Mawāqif al-Khawārij wa Fikrihim wa Adabihim*. Damaskus: Dār Talās, 1988.
- Ma‘rūf, Nāyif Maḥmūd. *Al-Khawārij fī al-‘Aṣr al-Umawī*. Beirut: Dār aṭ-Ṭalī‘ah, 1994.
- Marsh, David dan Gerry Stokker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, terj. Helmi Mahadi dan Shohifullah. Bandung: Nusa Media, 2011.

- Māwardī, Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muḥammad al-. *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1966.
- Mernissi, Fetima. *Islam and Democracy: Fear of the Modern World*, terj. Mary Jo Lakeland. Cambridge: Perseus Publishing, 2002.
- Miftāḥ, Ṣalih Ma‘yūf. *Jabal Nafūsah wa ‘Alāqatuh bi ad-Daulah ar-Rustamiyyah*. Tawālīt: Mu'assasah Tawālīt aṣ-Ṣaqāfiyyah, 2006.
- Minhaji, Akh. *Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Islamic Studies*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
- Mu‘ammar, ‘Alī Yahyā. *Al-Ibādiyyah baina al-Firaq al-Islāmiyyah ‘ind Kitāb al-Maqālat fī al-Qadīm wa al-Hadīs*. Oman: Wizārat at-Turās al-Qaumī wa aṣ-Ṣaqāfah, 1994.
- _____. *Al-Ibādiyyah fī Maukib at-Tārīkh*. Seeb: Maktabat ad-Dāmirī, 2008.
- Mu’nis, Ḥusain. *Atlas Tārīkh al-Islām*. Kairo: az-Zahrā' li al-I‘lām al-‘Arabī, 1987.
- Mubarrad al-. *Al-Kāmil fī al-Lugah wa al-Adab*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2004.
- Mudhofir, Ali. *Kamus Filsuf Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Muhammad, Muhammad al-Amīn dan Muhammad ‘Alī ar-Rahmānī. *Al-Mufid fī Tārīkh al-Magrib*. Casablanca: Dār al-Kitāb, t. t.
- Mursidin. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Muruwwah, Ḥusain. *Naza‘at al-Māddiyyah fī al-Falsafah al-‘Arabiyyah*. Beirut: Dār al-Fārābī, 1978.
- Mūsa, Muhammad Yūsuf. *Niżām al-Hukm fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t. t.
- Najjār, ‘Āmir an-. *Al-Ibādiyyah*. Kairo: Maktabat aṣ-Ṣaqāfah ad-Dīniyyah, 2004.
- _____. *Al-Khawārij: ‘Aqīdah, wa Fikran, wa Falsafah*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1990.
- Najjār, Husain Fauzī an-. *Al-Islām wa as-Siyāsah: Bahs fī Usūl an-Nazariyyah as-Siyāsiyyah wa Niżām al-Hukm fī al-Islām*. Kairo: Maṭbū‘at asy-Sya‘b, 1969.

- Nakosteen, Mehdi. *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim Education*. Colorado: University of Colorado Press, 1964.
- Nāmī, ‘Amr Khalīfah an-. *Dirāsat ‘an al-Ibādiyyah*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2001.
- Nāṣir, Muḥammad Ṣalih dan Sulṭān ibn Mubārak asy-Syaibānī. *Mu‘jam A‘lām al-Ibādiyyah min al-Qarn al-Awwal al-Hijrī ilā al-‘Aṣr al-Ḥadīr: Qism al-Masyriq*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2006.
- Naṣr Allāh, Sa‘dūn ‘Abbās. *Daulat al-Adārisah fī al-Magrib: al-‘Aṣr aż-Żahabī*. Beirut: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1987.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Qāsim, Qāsim 'Abduh. *'Aṣr Salāṭīn al-Mamālik at-Tārīkhī wa as-Siyāṣī*. Mesir: Ein for Human and Social Studies, 1998.
- Rais, Muḥammad Diyā' ad-Dīn ar-. *An-Nazariyyāt as-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabat Dār at-Turās, 1976.
- Remadi, Mounira Chapoutot. “Tunisia” dalam *The Encyclopaedia of Islam*, P. J. Bearman, TH. Bianquis, C. E. Bosworth, E. Van Donzel, dan W. P. Heinrichs (eds.), Jilid X. Leiden: E. J. Brill, 2000, hlm. 644-648.
- Riḍā, Muḥammad. *Źī an-Nūrain ‘Uṣmān ibn ‘Affān al-Khalīfah as-Ṣāliḥ*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1982.
- Rippin, Andrew dan Jan Knappert. *Textual Sources for the Study of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1986.
- Roberts, Keith A. *Religion in Sociological Perspective*. California: Wadsworth Publishing Company, 1995.
- Rofiq, Ahmad Choirul. *Benarkah Islam Menghukum Mati Orang Murtad?: Kajian Historis tentang Perang Riddah dan Hubungannya dengan Kebebasan Beragama*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Sa‘dah, Muḥammad Abū. *Al-Khawārij fī Mīzān al-Fikr al-Islāmī*. Kairo: Jāmi‘ah Hulwān, 1998.
- Şallābī, ‘Alī Muḥammad aş-. *Şafahāt Musyriqah min at-Tārīkh al-Islāmī fī asy-Syamāl al-Ifriqī*. Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2007.

- Shaban, M. A. *Islamic History: A New Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Shalaby, Ahmad. *History of Muslim Education*. Beirut: Dar al-Kashshaf, 1954.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____. *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis*. Yogyakarta: PLP2M, 1984.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- _____. "Pranata Politik" dalam *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (eds.). Jakarta: Kencana, 2007.
- Surūr, Muḥammad Jamāl ad-Dīn. *Tārīkh ad-Daulah al-Fatīmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1995.
- Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn as-. *Tārīkh al-Khulafā'*. Beirut: Dār al-Fikr, 1974.
- Syahrastanī, Abū al-Fath Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm asy-. *Al-Milal wa an-Nihāl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. t.
- Syalabī, Aḥmad. *Mausū‘ah at-Tārīkh al-Islāmī wa al-Hadārah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabat an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1984.
- Syalabī, Mahmūd. *Hayāh ‘Umar ibn ‘Abd al-Azīz*. Beirut: Dār al-Jil, 1989.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr at-. *Tārīkh at-Ṭabarī: Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Talbi, M. "Ifrīkiya" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, B. Lewis, V. L. Menage, CH. Pellat, dan J. Schacht (eds.), Jilid III. Leiden: E. J. Brill, 1971, hlm. 1047-1049.
- Tautal, Ferdinand, et al. *Al-Munjid fī al-A’lām*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1996.
- Thohir, Ajid dan Ading Kusdiana. *Islam di Asia Selatan: Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam di India, Pakistan, dan Bangladesh*. Bandung: Humaniora, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005.

Tirmizi, Abū Ḥasan at-. *Sunan at-Tirmizi*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Toha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Tourneau, Roger Le. “North Africa to the Sixteenth Century” dalam *The Cambridge History of Islam*, P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, dan Bernard Lewis (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Vida, G. Levi Della. “Khāridjites” dalam *The Encyclopaedia of Islam*, E. Van Donzel, B. Lewis, dan CH. Pellat (eds.), Jilid IV. Leiden: E. J. Brill, 1990, hlm. 1074-1077.

Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985.

_____. *The Formative Period of Islamic Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librarie du Liban, 1980.

Whaling, Frank. “Theological Approaches” dalam *Approaches to the Study of Religion*, Peter Connolly (ed.). London: Cassel, 1999.

Yahaya, Mahayudin Hj. dan Ahmad Jelani Halimi. *Sejarah Islam*. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1995.

Zaidān, Jurjī. *Tārīkh at-Tamaddun al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Hilāl, t. t.

Zirikli, Khair ad-Dīn az-. *Al-A'lām: Qāmūs Tarājim li Asyhar ar-Rijāl wa an-Nisā' min al-'Arab wa al-Musta'ribīn wa al-Mustasyriqīn*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1980.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**